

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan:

1. Penerapan asas keterbukaan belum berjalan efektif dalam proses pembentukan peraturan daerah.
2. Kendala penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah meliputi dua hal, yakni:
 - a. faktor internal, yang meliputi: terbatasnya keuangan daerah, dan tidak optimalnya pengelolaan sistem informasi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo.
 - b. faktor eksternal, yang meliputi: Minimnya partisipasi masyarakat dan rendahnya keterlibatan media dalam pembentukan peraturan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan agar:

1. DPRD Provinsi Gorontalo harus membuat sistem informasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi seputaran DPRD Provinsi Gorontalo serta dapat memberi masukan dengan mudah.
2. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Pelitian hukum*, Cetakan 1, (Bandung: PT. Citra Aitya Bakti, 2004).

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017).

Andi Pangerang Moenta dan Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Malang: Setara Pers, 2015).

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012).

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius,2007).

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (yogyakarta: pustaka pelajar. 2010).

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Pedia, 2011).

Nukila Evanty. *Paham Peraturan Daerah*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakrata. 2014

Peter mahmaud marzuki. *Penelitian hukum (edisi revisi)*. (Jakarta: Kencana prenada media group. 2011).

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

Sefti Ramsiaty, *et, al*, (ed). *Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan Dan Kemajuan Masyarakat Daerah*. (Jakarta: Pusat Perancang Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI, 2016).

Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Sirajuddin, *et, al*. *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan*, (Malang: Setara Press, 2015).

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim barakatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Tim Pustaka Mahardika. *Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).

Utang Rosidin, *“Otonomi Daerah dan Desentralisasi”* (Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya), (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, Oktober 2010).

Jurnal:

Novendri M. Nggilu. “Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lamlaj*. Volume 5 Issue 2. September 2020.

- Abdul Hamid Tome. "Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa". *Al-Adl*. Volume 13 Nomor 1. Januari 2020.
- Weny A. Dunga dan Abdul Hamid Tome. 2019. "Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Law Review*. Volume 1 Issue 1. Januari 2019.
- Albert Morangki. Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan. *Jurnal Hukum Unstrat*. Volume 20 Nomor 3 Tahun 2012.
- Fatkurohman dan Miftachus Sjuhad. Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. *Jurnal Media Hukum*, Volume 25 Nomor 2, Tahun 2018.
- Hasyim Asyari. Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2017.
- Iwan Sulistiyo, *et. al.* Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor. 1 Tahun 2018,
- Reny Rawasita dalam Muhammad Suharjono. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 19 Tahun 2014
- Rudy, Desentralisasi Indonesia Memupuk Demokrasi dan Penciptaan Tata Pemerintahan Lokal, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2007, hal. 45.

Sakinah Nadir. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor1 Tahun 2013.

Tomy M. Saragih, 'Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Jurnal Sasi Universitas Patimura*, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2011.

Zarkasi. Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2010.

Zaid Afif. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dialog*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2018.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Website:

Andi Arifudin, 2020, ada 16 Ranperda yang dibahas DPRD Provinsi Gorontalo.

Diakses dari: <https://gopos.id/2020-ada-16-ranperda-yang-dibahas-dprd-provinsi-gorontalo/> diakses pada 18 Agustus 2020.